

## TRANSFORMASI DAN FRAGMENTASI GERAKAN ISLAM INDONESIA PASCA PEMILU 2024

### *THE TRANSFORMATION AND FRAGMENTATION OF THE INDONESIAN ISLAMIC MOVEMENT POST-2024 ELECTION*

Kharisma Firdaus<sup>1</sup>, Muhammad Mukhobbir Risalah<sup>2</sup>, Arzeti Bilbina  
Setyawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sunan Gresik  
Email: [kharisma.f@lecturer.usg.ac.id](mailto:kharisma.f@lecturer.usg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Sunan Gresik  
Email: [m.mukhobbir@lecturer.usg.ac.id](mailto:m.mukhobbir@lecturer.usg.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Sunan Gresik  
Email: [arzeti.dpr@gmail.com](mailto:arzeti.dpr@gmail.com)

#### Abstrak

Artikel ini menyelidiki transformasi dan fragmentasi gerakan Islam di Indonesia pasca Pemilu 2024. Meskipun studi yang ada sebagian besar berfokus pada puncak mobilisasi Islamis selama 2016–2019, terutama gerakan 212, perhatian akademis terhadap perkembangan di periode pasca-2024 masih terbatas. Menggunakan metodologi kualitatif dengan desain studi kasus kolektif, penelitian ini mengacu pada dokumen organisasi, liputan media, materi digital, dan sumber sekunder yang mencakup periode 2014–2025. Kerangka analitis menggabungkan Struktur Peluang Politik, Teori Mobilisasi Sumber Daya, Teori Pembingkai, Institusionalisasi, dan Pasca-Islamisme. Temuan menunjukkan bahwa gerakan Islam setelah 2024 tidak mengalami penurunan secara langsung; sebaliknya, mereka menunjukkan proses transformasi struktural dan fragmentasi internal. Konsolidasi elit politik nasional dan penyempitan ruang politik oposisi telah secara signifikan mengurangi mobilisasi berbasis identitas skala besar. Sebagai tanggapan, aktor-aktor gerakan telah menyesuaikan kembali strategi mereka, beralih dari demonstrasi jalanan yang konfrontatif menuju bentuk-bentuk keterlibatan yang lebih pragmatis, termasuk aktivisme digital, advokasi yang berorientasi pada kebijakan, dan integrasi selektif ke dalam partai politik dan lembaga negara. Selain itu, pembingkai isu telah bergeser dari identitas agama dan keluhan moral ke keprihatinan sosial-ekonomi, tata kelola, dan moralitas publik yang lebih luas. Studi ini berpendapat bahwa periode pasca-2024 mewakili konfigurasi ulang yang lebih luas dari aktivisme Islam dalam demokrasi elektoral Indonesia yang semakin terkonsolidasi. Alih-alih menghilang, gerakan-gerakan Islam telah melakukan diversifikasi secara adaptif, menandai transisi menuju lingkungan pasca-polarisasi yang lebih pragmatis dan terdiferensiasi secara internal.

**Kata kunci:** Gerakan Islam, Struktur Peluang Politik, Fragmentasi dan Transformasi, Pemilu 2024

#### Abstract

*This article investigates the transformation and fragmentation of Islamic movements in Indonesia in the aftermath of the 2024 General Election. While existing studies have primarily concentrated on the height of Islamist mobilization during 2016–2019 most notably the 212 movement scholarly attention to developments in the post-2024 period remains limited. Using a qualitative methodology*

*with a collective case study design, this research draws upon organizational documents, media coverage, digital materials, and secondary sources spanning 2014–2025. The analytical framework combines Political Opportunity Structure, Resource Mobilization Theory, Framing Theory, Institutionalization, and Post-Islamism. The findings indicate that Islamic movements after 2024 have not undergone outright decline; instead, they exhibit processes of structural transformation and internal fragmentation. The consolidation of national political elites and the contraction of oppositional political space have significantly reduced large-scale identity-based mobilization. In response, movement actors have recalibrated their strategies, shifting from confrontational street demonstrations toward more pragmatic forms of engagement, including digital activism, policy-oriented advocacy, and selective integration into political parties and state institutions. Moreover, issue framing has shifted from religious identity and moral grievance to broader socio-economic, governance, and public morality concerns. The study contends that the post-2024 period represents a broader reconfiguration of Islamic activism within Indonesia's increasingly consolidated electoral democracy. Rather than disappearing, Islamic movements have diversified adaptively, marking a transition toward a more pragmatic and internally differentiated post-polarization environment.*

**Keywords:** *Islamic Movements, Political Opportunity Structure; Fragmentation and Transformation, Indonesia; 2024 election*

## PENDAHULUAN

Dalam literatur gerakan sosial, aksi kolektif dipahami sebagai aktivitas terorganisasi yang diarahkan untuk mendorong perubahan sosial, politik, maupun kultural melalui pemanfaatan sumber daya, konstruksi identitas kolektif, serta pembedingkaian isu yang strategis (Tarrow, 2011). Keberadaan gerakan sosial tidak terlepas dari konteks struktur kesempatan politik yang membentuk ruang kemungkinan baik membuka maupun membatasi bagi artikulasi tuntutan. Dalam konteks keagamaan, khususnya Islam, gerakan sosial sering terwujud dalam bentuk aktivisme kolektif yang berlandaskan identitas religius dan bertujuan memengaruhi kebijakan negara serta dinamika ruang publik. Aktivisme ini dapat ditempuh melalui jalur formal, seperti partisipasi dalam partai politik atau organisasi legal, maupun melalui mekanisme non-institusional seperti demonstrasi, kampanye moral, dan tekanan sosial (Wiktorowicz, 2004).

Pengalaman di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa gerakan Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan politik. Di Turki, misalnya, transformasi gerakan Islam terjadi melalui proses institusionalisasi ke dalam partai politik sehingga mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi elektoral (Yavuz, 2003). Sebaliknya, di sejumlah negara Timur Tengah, munculnya populisme Islam dipahami sebagai reaksi terhadap krisis representasi dan ketimpangan sosial-

ekonomi, dengan identitas agama dijadikan basis mobilisasi untuk menantang dominasi elite (Hadiz, 2016). Variasi tersebut menegaskan bahwa gerakan Islam tidak statis, melainkan terus mengalami penyesuaian seiring perubahan struktur kekuasaan, peluang politik, dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Di Indonesia, momentum Reformasi 1998 menciptakan ruang demokrasi yang lebih terbuka bagi kebebasan berserikat dan berpendapat. Konteks ini memicu pertumbuhan partai politik dan organisasi kemasyarakatan Islam dengan beragam orientasi ideologis (Mietzner, 2013). Perkembangan tersebut tidak hanya tampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada pola mobilisasi massa, strategi kontestasi elektoral, serta artikulasi wacana keagamaan di ruang publik. Demokratisasi menyediakan arena kompetisi yang relatif inklusif, memungkinkan kelompok Islam berperan baik sebagai aktor politik formal maupun sebagai kekuatan penekan di luar struktur pemerintahan.

Sejak Pemilu Presiden 2014, dinamika politik nasional memperlihatkan meningkatnya penggunaan simbol dan narasi keagamaan sebagai instrumen mobilisasi. Politisasi identitas agama menjadi salah satu karakter utama dalam kontestasi elektoral, terutama ketika kompetisi berlangsung dalam pola polarisasi dua kubu besar (Aspinall & Mietzner, 2019). Eskalasi tersebut mencapai titik krusial dalam peristiwa Aksi 212 pada 2016–2017, yang dipicu oleh isu dugaan penistaan agama. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi berskala besar, tetapi juga menjadi momen konsolidasi jaringan ormas dan simpul dakwah Islam. Melalui framing isu penistaan agama dan moralitas publik, berbagai organisasi mampu membangun koalisi lintas kelompok yang bersifat ad hoc namun efektif dalam menggalang solidaritas kolektif (Mietzner & Muhtadi, 2018).

Rangkaian mobilisasi tersebut menunjukkan kapasitas organisasi Islam dalam mengelola sumber daya, memanfaatkan media sosial, serta membangun identitas kolektif berbasis sentimen religius. Dari perspektif teori gerakan sosial, keberhasilan ini merefleksikan kombinasi antara peluang politik yang terbuka, kemampuan mobilisasi sumber daya, dan framing isu yang sesuai dengan aspirasi publik (Tarrow, 2011). Dampaknya terlihat pada konfigurasi politik nasional, terutama dalam menguatnya lanskap politik identitas menjelang Pemilu 2019.

Dalam Pemilu 2019, politik identitas berbasis agama tetap memainkan peran signifikan dalam memengaruhi perilaku pemilih dan dinamika kampanye (Muhtadi, 2019). Polarisasi sosial yang tajam menjadi konsekuensi dari kompetisi yang dibingkai melalui oposisi religius dan ideologis. Politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai strategi elektoral, tetapi juga memengaruhi kohesi sosial dan hubungan antar-kelompok dalam masyarakat (Hefner, 2018). Pada fase ini, jaringan gerakan Islam yang terkonsolidasi sejak momentum 212 tampak memiliki daya tawar dan pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk opini publik serta arah dukungan politik.

Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berlangsung secara konsisten. Pasca Pemilu 2024, terlihat adanya perubahan dalam dinamika gerakan Islam, khususnya kelompok yang sebelumnya aktif dalam mobilisasi 212. Pertama, intensitas aksi massa berbasis isu identitas agama mengalami penurunan dibandingkan periode 2016–2019. Kedua, aliansi antar-ormas eks-212 menunjukkan kecenderungan terfragmentasi, baik dalam bentuk perbedaan pilihan politik maupun pergeseran orientasi strategis. Ketiga, muncul indikasi ketegangan antara elite organisasi dan sebagian basis pendukung dalam merespons konfigurasi politik terbaru. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan politik nasional dan penguatan regulasi negara terhadap organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia serta pelarangan Front Pembela Islam menjadi contoh konkret intervensi negara yang berdampak langsung terhadap struktur dan strategi gerakan.

Perubahan tersebut memunculkan persoalan teoretis yang penting. Apakah fenomena pasca-2024 mencerminkan kemunduran kapasitas mobilisasi gerakan Islam setelah puncak polarisasi 2019? Ataukah justru menunjukkan proses transformasi strategi yang disertai fragmentasi organisasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur kesempatan politik? Sejumlah kajian sebelumnya lebih berfokus pada fase mobilisasi puncak 2016–2019 dan fenomena populisme Islam (Hadiz, 2016; Mietzner & Muhtadi, 2018). Sementara itu, analisis terhadap fase pasca-2024, terutama yang menelaah dinamika internal dan konfigurasi baru ormas eks-212, masih relatif terbatas.

Dalam kerangka teori gerakan sosial, perubahan konteks politik seperti menyempitnya ruang oposisi dan meningkatnya konsolidasi elite dapat menghasilkan dua kemungkinan utama: demobilisasi atau transformasi (Tarrow, 2011). Gerakan dapat mengalami penurunan apabila kehilangan akses terhadap sumber daya dan isu yang resonan. Sebaliknya, gerakan juga dapat menyesuaikan diri melalui strategi baru, seperti institusionalisasi, digitalisasi aktivisme, atau pergeseran fokus isu dari konfrontatif ke pragmatis. Oleh sebab itu, analisis yang sistematis diperlukan untuk menentukan apakah dinamika pasca Pemilu 2024 lebih tepat dipahami sebagai decline atau sebagai bentuk rekonfigurasi strategis.

Penelitian ini menawarkan dua aspek kebaruan. Pertama, dari sisi temporal, studi ini menitikberatkan pada periode pasca Pemilu 2024 yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian sebelumnya berhenti pada analisis mobilisasi 2012 atau Pemilu 2019. Kedua, penelitian ini memusatkan perhatian pada ormas Islam non-arus utama sebagai unit analisis utama, berbeda dengan studi yang lebih banyak membahas peran organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah atau fokus pada dinamika partai politik Islam (Bush, 2009; Aspinall & Mietzner, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi dan fragmentasi gerakan Islam Indonesia pasca Pemilu 2024 melalui pendekatan teori gerakan sosial dan struktur kesempatan politik. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan politik identitas dalam demokrasi Indonesia sekaligus memperkaya diskursus tentang adaptasi gerakan Islam dalam konteks sistem politik yang semakin terkonsolidasi. Dalam menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan dalam studi gerakan sosial dan pendekatan transformasi gerakan.

Dalam studi gerakan sosial, terdapat tiga pendekatan utama yang relevan untuk menjelaskan dinamika tersebut, yakni *Political Opportunity Structure*, *Resource Mobilization Theory*, dan *Framing Theory*. Ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang mengintegrasikan dimensi struktural, organisasional, dan kultural secara simultan. (1) Pendekatan *Political Opportunity Structure* (POS) menegaskan bahwa perkembangan gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh

konfigurasi peluang dalam sistem politik. Variabel seperti tingkat keterbukaan sistem, fragmentasi atau konsolidasi elite, serta kapasitas negara dalam melakukan represi atau kooptasi menjadi faktor penting yang menentukan ruang gerak gerakan sosial (Tarrow, 2011; McAdam, 1996). (2) *Resource Mobilization Theory* (RMT) memandang gerakan sosial sebagai aktor rasional yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan mengakses dan mengelola sumber daya (McCarthy & Zald, 1977). Dan (3) *Framing Theory* menekankan pentingnya proses konstruksi makna dalam keberhasilan gerakan sosial. Menurut Snow dan Benford (1988), gerakan membangun legitimasi melalui tiga tahap framing: *diagnostic framing* (identifikasi masalah), *prognostic framing* (penawaran solusi), dan *motivational framing* (ajakan bertindak).

Sedangkan pendekatan transformasi gerakan berbicara tentang institusionalisasi, post-islamism, dan teori fragmentasi. Institusionalisasi merujuk pada proses ketika aktor gerakan memasuki struktur formal politik, seperti partai atau lembaga negara (Tarrow, 2011). (2) Konsep *Post-Islamism* dari Bayat (2007) menjelaskan pergeseran gerakan Islam dari orientasi ideologis-totalistik menuju pendekatan yang lebih pragmatis, plural, dan adaptif terhadap demokrasi. Post-Islamisme bukan berarti sekularisasi, melainkan rekonstruksi hubungan antara agama dan politik dalam kerangka demokrasi. Dalam konteks Indonesia, setelah fase populisme Islam yang kuat (Hadiz, 2016). (3) Teori fragmentasi menekankan bahwa koalisi berbasis isu cenderung bersifat sementara dan rentan pecah ketika momentum mobilisasi mereda (Della Porta & Diani, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *collective case study* (studi kasus kolektif). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam dinamika transformasi dan fragmentasi gerakan Islam dalam konteks politik tertentu, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, interpretasi aktor, serta perubahan strategi organisasi secara kontekstual dan interpretatif (Creswell & Poth, 2018).

Desain *collective case study* digunakan karena penelitian ini menganalisis beberapa organisasi sekaligus yakni ormas Islam eks-212 seperti FPI, PA 212, GNPF-Ulama, HTI (sebelum pembubaran), MMI, dan jaringan simpul dakwah terkait untuk memahami fenomena yang lebih luas. Menurut Stake (1995), studi kasus kolektif bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena melalui perbandingan beberapa kasus yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah transformasi dan fragmentasi gerakan Islam pasca Pemilu 2024.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi literatur tidak terbatas pada buku dan artikel ilmiah, tetapi juga mencakup dokumen organisasi, arsip digital, serta laporan media yang dianalisis secara sistematis (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena sebagian organisasi yang menjadi objek penelitian telah mengalami pembubaran atau perubahan struktur formal, sehingga akses terhadap data primer relatif terbatas.

Penelitian ini juga menerapkan analisis komparatif temporal dengan membandingkan dinamika gerakan Islam sebelum Pemilu 2024, khususnya periode 2014–2019 dan 2019–2024 dengan kondisi pasca Pemilu 2024. Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi apakah perubahan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai penurunan (*decline*), transformasi strategi, atau fragmentasi struktural sebagaimana dirumuskan dalam kerangka teori (Tarrow, 2011; Della Porta & Diani, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu analisis pemberitaan, dokumen-dokumen pendukung atau menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang mengangkat tema gerakan politik Islam di tahun-tahun tersebut. Dokumen dipandang sebagai sumber penting dalam penelitian kualitatif karena merepresentasikan posisi formal dan orientasi strategis organisasi (Bowen, 2009). Rentang waktu dokumen yang dianalisis mencakup periode 2014–2025 guna memungkinkan identifikasi perubahan sebelum dan sesudah Pemilu 2024 secara sistematis.

Kedua dengan melakukan Analisis Konten Media dan Media Sosial. Media massa dan media sosial merupakan arena penting bagi produksi wacana dan mobilisasi simbolik gerakan Islam, terutama sejak momentum Aksi 212 (Muhtadi, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menelaah pemberitaan media nasional, portal berita daring, serta akun resmi atau yang berafiliasi dengan organisasi yang diteliti. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi perubahan dalam framing isu, intensitas mobilisasi, serta pola komunikasi politik sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Dalam konteks ini, media sosial dipahami sebagai ruang konstruksi makna dan legitimasi gerakan (Snow & Benford, 1988).

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa dimensi utama yaitu, Struktur Organisasi dimana penelitian menelaah perubahan dalam struktur kepemimpinan, pola koordinasi jaringan, serta bentuk kelembagaan sebelum dan sesudah 2024. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi gejala institusionalisasi, restrukturisasi, atau disorganisasi gerakan (Tarrow, 2011). Kedua, Narasi Publik yaitu perubahan framing isu, slogan, serta pesan politik menjadi fokus analisis untuk mengidentifikasi transformasi wacana. Pergeseran dari narasi “penistaan agama” menuju isu kesejahteraan, moralitas publik, atau kebijakan ekonomi dipahami sebagai indikator adaptasi framing (Snow & Benford, 1988).

Ketiga, Strategi Mobilisasi yaitu penelitian mengidentifikasi perubahan arena dan metode mobilisasi, termasuk pergeseran dari aksi jalanan menuju advokasi kebijakan, kampanye digital, atau integrasi dalam struktur politik formal. Dimensi ini berkaitan dengan teori mobilisasi sumber daya dan institusionalisasi gerakan. Terakhir adalah melihat Pola Koalisi dimana Analisis juga diarahkan pada bentuk dan dinamika aliansi antar-ormas, hubungan dengan partai politik, serta kecenderungan fragmentasi internal maupun eksternal (Della Porta & Diani, 2006).

Selanjutnya adalah Teknik Analisis Data melalui pendekatan Content Analysis. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi pola tema, narasi, dan strategi dalam dokumen dan teks media. *Content analysis* memungkinkan pengkodean sistematis terhadap kategori tertentu dalam teks (Krippendorff, 2018). Tema yang dikodekan antara lain, oposisi politik, moralitas agama, kesejahteraan, demokrasi, moderasi, dan integrasi politik.

Kedua, *Comparative Temporal Analysis*, dimana Analisis komparatif temporal dilakukan dengan membandingkan dua periode utama yaitu, Pra-2024 (2014–2024), dengan fokus pada fase mobilisasi intensif 2016–2019 dan Pasca-2024 (2024–2025). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi perubahan dalam struktur peluang politik, strategi mobilisasi, serta tingkat fragmentasi organisasi (McAdam, 1996). Dengan demikian, perubahan tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam lintasan waktu.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menangkap dinamika transformasi dan fragmentasi gerakan Islam secara menyeluruh dengan mengintegrasikan analisis struktural, organisasional, dan wacana dalam kerangka komparatif temporal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan apakah pasca Pemilu 2024 terjadi penurunan kapasitas mobilisasi atau justru rekonstruksi strategis gerakan Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Pola Mobilisasi

#### 1. Penurunan Aksi Massa Berbasis Identitas

Hasil analisis terhadap dokumen organisasi, arsip digital, serta pemberitaan media nasional seperti *Kompas*, *Tempo*, dan *CNN Indonesia* sepanjang 2016–2025 menunjukkan bahwa periode 2016–2019 merupakan fase intensifikasi mobilisasi massa berbasis identitas Islam. Aksi 411 dan 212 menjadi tonggak penting konsolidasi lintas ormas yang berhasil menyatukan jaringan dakwah, aktivis, dan simpatisan dalam satu isu sentral, yakni dugaan penistaan agama (Mietzner & Muhtadi, 2018). Mobilisasi tersebut mencerminkan keberhasilan framing isu yang resonan sekaligus adanya dukungan atau setidaknya celah politik dari sebagian elite oposisi, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *Political Opportunity Structure* (Tarrow, 2011).

Sebaliknya, setelah Pemilu 2024, frekuensi aksi massa berskala besar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kompilasi data dari laporan media dan lembaga pemantau aksi publik memperlihatkan bahwa demonstrasi dengan partisipasi di atas 10.000 orang jauh berkurang dibandingkan fase 2016–2019. Aksi

yang tetap berlangsung cenderung bersifat lokal, sporadis, dan tidak lagi terkoordinasi dalam skala nasional. Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kemunduran ideologis. Dalam perspektif POS, konsolidasi elite politik pasca 2024 mempersempit ruang oposisi berbasis identitas. Tidak adanya polarisasi elite yang tajam sebagaimana terjadi pada 2014 dan 2019 mengurangi insentif bagi mobilisasi jalanan. Struktur peluang politik yang lebih stabil dan terintegrasi membatasi efektivitas strategi konfrontatif di ruang publik (Tarrow, 2011).

## 2. Fragmentasi Organisasi

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah munculnya fragmentasi dalam jaringan ormas eks-212. Telaah terhadap dokumen internal dan pernyataan publik menunjukkan adanya divergensi strategi antar-organisasi. Sebagian kelompok mengarah pada pendekatan advokasi kebijakan, sebagian mempertahankan retorika oposisi, sementara lainnya mengalami pelemahan akibat tekanan regulatif. Dalam perspektif *Fragmentation Theory*, koalisi berbasis isu tunggal memiliki kecenderungan rapuh setelah momentum kolektif mereda (Della Porta & Diani, 2006). Aksi 212 berhasil menyatukan aktor dengan latar ideologis beragam dalam satu agenda bersama. Namun ketika isu sentral kehilangan daya mobilisasi, solidaritas koalisi turut melemah.

Gejala fragmentasi tercermin pada, (1) perbedaan sikap terhadap pemerintahan pasca-2024, (2) rivalitas atau pergeseran kepemimpinan, serta (3) menurunnya koordinasi aksi lintas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan eks-212 tidak lagi beroperasi sebagai blok solidaritas berbasis isu, melainkan sebagai jaringan yang lebih cair dan terfragmentasi.

## Pergeseran Isu

### 1. Dari Identitas Agama ke Isu Ekonomi dan Kebijakan Publik

Analisis framing terhadap rilis organisasi dan konten media sosial periode 2024–2025 menunjukkan adanya perubahan substansial dalam isu yang diangkat. Jika pada fase 2016–2019 narasi dominan berfokus pada ancaman terhadap Islam dan moralitas agama (Hefner, 2018), maka pasca 2024 isu yang lebih menonjol

berkaitan dengan ekonomi umat, ketimpangan sosial, harga kebutuhan pokok, serta kebijakan publik.

Dalam kerangka *Framing Theory*, perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap konteks sosial-politik yang baru (Snow & Benford, 1988). Isu identitas yang bersifat eksklusif tidak lagi memiliki resonansi luas, terutama di kalangan pemilih Muslim muda yang lebih pragmatis dan sensitif terhadap isu kesejahteraan (Aspinall & Mietzner, 2019). Dengan demikian, pergeseran framing dapat dipahami sebagai strategi untuk mempertahankan relevansi publik.

## 2. Dakwah Sosial dan Reduksi Agitasi Politik

Temuan lain menunjukkan meningkatnya aktivitas dakwah sosial, filantropi, dan pendidikan keagamaan dibandingkan dengan agitasi politik terbuka. Pergeseran ini dapat dibaca melalui konsep *Post-Islamism* (Bayat, 2007), yang menjelaskan kecenderungan gerakan Islam untuk beradaptasi dengan demokrasi melalui pendekatan yang lebih pragmatis dan sosial-kultural.

Perubahan ini bukan berarti gerakan mengalami depolitisasi sepenuhnya, melainkan terjadi reorientasi strategi. Dalam situasi kejenuhan terhadap polarisasi identitas, aktivitas sosial-keagamaan menjadi sarana untuk menjaga legitimasi dan basis dukungan tanpa konfrontasi langsung terhadap struktur kekuasaan.

## Transformasi Arena Perjuangan

Data menunjukkan bahwa menurunnya mobilisasi fisik di ruang publik diimbangi dengan meningkatnya aktivitas di media sosial. Platform digital menjadi sarana utama dalam membangun opini, menyebarkan narasi, dan mempertahankan jaringan pendukung. Dalam perspektif *Resource Mobilization Theory*, pergeseran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi struktural, di mana sumber daya digital lebih murah, fleksibel, dan minim risiko dibanding mobilisasi fisik (McCarthy & Zald, 1977).

Selain itu yang terjadi adalah adanya perubahan Mobilisasi Massa ke Advokasi Kebijakan. Sebagian aktor gerakan memilih jalur advokasi melalui diskusi publik, seminar, dan partisipasi dalam forum kebijakan. Strategi ini

menunjukkan adanya proses institusionalisasi sebagaimana dijelaskan Tarrow (2011), di mana gerakan memasuki arena formal untuk mempengaruhi kebijakan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari tekanan eksternal menuju keterlibatan dalam mekanisme formal negara.

Terkahir transformasi ini terjadi karena elit gerakan yang terintegrasi dalam Partai dan Birokrasi. Keterlibatan sebagian elite gerakan dalam partai politik atau pendekatan terhadap birokrasi menandai proses integrasi ke dalam sistem formal. Proses ini berimplikasi pada moderasi tuntutan dan kompromi politik. Namun, institusionalisasi juga berpotensi memicu ketegangan internal karena tidak seluruh aktor sepakat dengan pendekatan pragmatis tersebut.

### **Faktor Penyebab Transformasi**

Transformasi gerakan Islam pasca Pemilu 2024 tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara perubahan struktur politik, dinamika sosial, serta restrukturisasi sumber daya gerakan. Setidaknya terdapat empat faktor utama yang menjelaskan proses perubahan tersebut.

Konsolidasi elite nasional menjadi faktor struktural yang paling berpengaruh dalam penyebab transformasi sebuah gerakan. Berbeda dengan periode 2014–2019 yang ditandai oleh polarisasi tajam antar-elite, situasi pasca Pemilu 2024 menunjukkan kecenderungan integrasi politik dan stabilitas koalisi yang lebih kuat. Dalam perspektif *Political Opportunity Structure* (POS), kondisi ini mencerminkan menyempitnya peluang mobilisasi karena absennya konflik elite yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang artikulasi gerakan sosial (Tarrow, 2011; McAdam, 1996). Seperti ditunjukkan oleh Mietzner dan Muhtadi (2018), keberhasilan mobilisasi Islam pada periode 2016–2017 sangat bergantung pada fragmentasi elite dan dukungan politik tertentu. Ketika faktor tersebut melemah, insentif untuk mobilisasi berbasis oposisi juga ikut berkurang. Oleh karena itu, transformasi gerakan pasca 2024 dapat dipahami sebagai respons terhadap struktur politik yang semakin terkonsolidasi dan kurang terbuka.

Faktor kedua adalah kejenuhan publik terhadap politik identitas menjadi faktor kultural yang mendorong perubahan strategi gerakan. Polarisasi yang intens pada periode sebelumnya telah menimbulkan kelelahan sosial (*political fatigue*), terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Penelitian Aspinall dan Mietzner (2019) menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas secara berlebihan dapat memicu resistensi publik dan mengurangi legitimasi demokrasi. Dalam kerangka *Framing Theory* (Snow & Benford, 1988), kondisi ini mendorong gerakan untuk melakukan penyesuaian framing agar tetap relevan. Pergeseran dari isu identitas ke isu kesejahteraan dan kebijakan publik mencerminkan upaya adaptasi terhadap preferensi audiens yang semakin rasional dan pragmatis.

Faktor penegakan hukum dan regulasi negara terhadap organisasi tertentu turut memengaruhi kapasitas mobilisasi gerakan merupakan faktor ketiga penyebab transformasi. Pembubaran organisasi seperti HTI dan pelarangan FPI tidak hanya menghilangkan struktur formal, tetapi juga mengganggu jaringan mobilisasi, akses sumber daya, serta legitimasi organisasi. Dalam perspektif *Resource Mobilization Theory* (McCarthy & Zald, 1977), hilangnya sumber daya organisasi merupakan faktor kunci yang melemahkan kemampuan gerakan dalam melakukan aksi kolektif. Namun demikian, tekanan negara tidak selalu berujung pada disintegrasi total. Sebagaimana diindikasikan dalam temuan penelitian ini, kondisi tersebut justru mendorong transformasi menuju bentuk jaringan yang lebih informal dan terdesentralisasi (Della Porta & Diani, 2006), yang menunjukkan adanya kapasitas adaptasi terhadap lingkungan yang lebih restriktif.

Perubahan preferensi generasi muda Muslim menjadi faktor sosial yang semakin menentukan adalah faktor keempat penyebab transformasi. Generasi muda saat ini cenderung memiliki orientasi politik yang lebih pragmatis, kurang terikat pada ideologi identitas yang rigid, serta lebih aktif dalam ruang digital. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena utama dalam pembentukan opini dan mobilisasi simbolik. Pergeseran ini mendorong gerakan untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan mobilisasi dengan karakteristik generasi digital. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *Post-Islamism* (Bayat, 2007), di mana ekspresi

keislaman tidak lagi selalu diwujudkan melalui mobilisasi politik yang konfrontatif, tetapi melalui praktik sosial, kultural, dan digital yang lebih fleksibel dan adaptif.

Sehingga dalam transformasi gerakan Islam pasca Pemilu 2024 merupakan hasil dari kombinasi faktor struktural (konsolidasi elite dan regulasi negara), kultural (kejenuhan terhadap politik identitas), serta generasional (perubahan preferensi pemilih muda). Interaksi faktor-faktor tersebut menghasilkan perubahan mendasar dalam strategi, arena, dan orientasi gerakan. Oleh karena itu, alih-alih mengalami kemunduran, gerakan Islam justru menunjukkan kapasitas adaptif dalam merespons perubahan lingkungan politik dan sosial, sekaligus menandai pergeseran menuju bentuk gerakan yang lebih plural, pragmatis, dan terfragmentasi dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer.

### **Tipologi Gerakan Islam Pasca 2024: Dari Polarisasi Menuju Rekonfigurasi Struktural**

Berdasarkan analisis terhadap perubahan pola mobilisasi, pergeseran framing, redistribusi sumber daya, serta transformasi arena perjuangan, penelitian ini mengidentifikasi empat tipologi utama gerakan Islam pasca Pemilu 2024. Tipologi tersebut bukan sekadar klasifikasi deskriptif, melainkan representasi dari proses diferensiasi internal yang muncul sebagai respons terhadap perubahan struktur peluang politik dan konfigurasi kekuasaan.

**Tabel 1** Tipologi Gerakan Islam Pasca 2024

Tipologi	Karakteristik	Pola Umum
Melemah	Struktur organisasi terganggu, kehilangan sumber daya, minim mobilisasi	Organisasi terdampak pembubaran dan represi
Adaptif	Pergeseran isu dan arena perjuangan	Dakwah sosial dan aktivisme digital
Terinstitusionalisasi	Integrasi ke dalam partai politik atau birokrasi	Advokasi kebijakan formal
Non-elektoral	Fokus pada penguatan sosial-keagamaan	Pendidikan, filantropi, dan pengembangan komunitas

#### 1. Gerakan Melemah: Konsekuensi Penyempitan Struktur Peluang Politik

Tipologi pertama merujuk pada kelompok yang mengalami penurunan kapasitas mobilisasi secara signifikan akibat tekanan hukum, pembatasan kelembagaan, serta berkurangnya dukungan elite politik. Dalam kerangka *Political Opportunity Structure*, kondisi ini mencerminkan penyempitan ruang politik yang drastis (Tarrow, 2011). Ketiadaan polarisasi elite yang tajam serta meningkatnya kontrol negara terhadap aktivitas kolektif membatasi ruang gerak organisasi dalam mengkonsolidasikan aksi publik.

Dari perspektif *Resource Mobilization Theory* (McCarthy & Zald, 1977), kelompok dalam kategori ini kehilangan akses terhadap sumber daya organisasi formal, jaringan pendukung, serta legitimasi publik yang sebelumnya menopang mobilisasi mereka. Ketika sumber daya strategis melemah, kemampuan untuk mengorganisasi aksi kolektif pun menurun. Namun demikian, pelemahan tidak identik dengan pembubaran total. Dalam sejumlah kasus, tekanan struktural justru mendorong transformasi ke bentuk jaringan yang lebih informal, terdesentralisasi, dan sulit terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa represi negara dapat mengubah konfigurasi gerakan tanpa sepenuhnya menghapus keberadaannya.

## 2. Gerakan Adaptif: Reframing dan Peralihan Arena

Kategori kedua mencerminkan kelompok yang menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan politik. Kelompok ini menggeser narasi dari mobilisasi berbasis identitas agama yang konfrontatif menuju isu-isu kesejahteraan, moralitas publik, serta keadilan sosial. Pergeseran tersebut selaras dengan *Framing Theory* yang menekankan pentingnya penyesuaian narasi agar tetap relevan dengan audiens yang berubah (Snow & Benford, 1988).

Pasca 2024, isu ekonomi dan stabilitas sosial memperoleh resonansi yang lebih kuat dibanding isu simbolik identitas. Sebagai respons, kelompok adaptif mengalihkan arena perjuangan ke ruang digital. Media sosial menjadi medium utama untuk membangun opini dan mempertahankan eksistensi tanpa risiko konfrontasi langsung. Dalam kerangka *Resource Mobilization Theory*, penggunaan platform digital merupakan strategi rasional karena membutuhkan biaya lebih rendah dan lebih fleksibel dibanding mobilisasi fisik. Secara konseptual, dinamika

ini sejalan dengan gagasan *Post-Islamism* (Bayat, 2007), yang menandai pergeseran dari pendekatan ideologis-konfrontatif menuju strategi yang lebih pragmatis dan kompatibel dengan demokrasi. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas gerakan Islam dalam menghadapi perubahan struktur politik.

### 3. Gerakan Terinstitusionalisasi: Integrasi ke dalam Sistem Formal

Tipologi ketiga menggambarkan proses institusionalisasi, yaitu ketika sebagian aktor gerakan memilih untuk terlibat dalam partai politik atau struktur birokrasi. Dalam literatur gerakan sosial, institusionalisasi dipahami sebagai transisi dari mobilisasi jalanan menuju partisipasi dalam mekanisme formal negara (Tarrow, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah aktor eks-212 memilih jalur advokasi kebijakan sebagai strategi baru. Melalui mekanisme formal, mereka berupaya memengaruhi regulasi dan kebijakan publik dalam jangka panjang. Meskipun strategi ini memperluas akses terhadap pengambilan keputusan, ia juga berpotensi melemahkan karakter mobilisasi simbolik yang sebelumnya menjadi kekuatan utama gerakan. Fenomena ini mengandung dilema klasik gerakan sosial: integrasi ke dalam sistem meningkatkan akses terhadap kekuasaan, tetapi dapat mengikis solidaritas dan identitas kolektif. Tidak jarang, perbedaan pandangan antara kelompok yang memilih jalur pragmatis dan kelompok yang mempertahankan sikap konfrontatif memicu fragmentasi internal.

### 4. Gerakan Non-Elektoral: Reorientasi Strategi Sosial

Tipologi keempat mencakup kelompok yang mengalihkan fokus pada aktivitas sosial-keagamaan non-elektoral, seperti pendidikan, filantropi, dan penguatan komunitas. Pergeseran ini dapat terlihat sebagai depolitisasi, tetapi analisis menunjukkan bahwa ia lebih tepat dipahami sebagai reorientasi strategi.

Dalam perspektif *Post-Islamism* (Bayat, 2007), gerakan dapat mempertahankan nilai dan identitas keislaman tanpa menjadikannya instrumen mobilisasi politik langsung. Aktivitas sosial yang bersifat gradual memungkinkan penguatan basis komunitas dan legitimasi moral secara jangka panjang. Strategi ini

bersifat lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada momentum elektoral. Kategori ini memperlihatkan bahwa energi gerakan tidak menghilang, melainkan dialihkan ke arena sosial yang lebih stabil dan relatif aman dari turbulensi politik.

Secara keseluruhan, tipologi ini mengarah pada satu kesimpulan penting. dinamika pasca Pemilu 2024 lebih tepat dipahami sebagai proses rekonfigurasi multidimensi daripada sekadar kemunduran gerakan. Fragmentasi yang terjadi bukanlah tanda kehancuran, melainkan diferensiasi strategi sebagai respons terhadap perubahan struktur peluang politik.

Jika pada periode 2016–2019 gerakan Islam tampil sebagai blok mobilisasi yang relatif solid, maka pasca 2024 gerakan ini berkembang menjadi spektrum yang lebih plural. Mulai dari oposisi residual, adaptasi digital, integrasi institusional, hingga orientasi sosial-keagamaan.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian tentang dinamika gerakan Islam dalam demokrasi elektoral yang semakin terkonsolidasi. Gerakan sosial bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan struktur kekuasaan, distribusi sumber daya, serta preferensi sosial. Oleh karena itu, fase pasca 2024 dapat dipahami sebagai transisi menuju pluralitas bentuk gerakan Islam yang lebih cair, terfragmentasi, namun sekaligus menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan Islam pasca Pemilu 2024 lebih tepat dipahami sebagai dampak dari perubahan struktur politik yang lebih luas, bukan sekadar indikasi penurunan mobilisasi. Pertama, terdapat penyempitan *political opportunity structure* yang ditandai oleh semakin solidnya konsolidasi elite nasional serta berkurangnya polarisasi oposisi. Dalam perspektif Tarrow (2011) dan McAdam (1996), kondisi ini menurunkan insentif bagi mobilisasi berbasis konflik identitas karena ruang politik untuk artikulasi gerakan konfrontatif menjadi semakin terbatas.

Kedua, perubahan tersebut berdampak pada melemahnya kohesi aliansi berbasis isu. Koalisi yang sebelumnya terbentuk dalam momentum Aksi 212 kehilangan daya ikat ketika isu pemersatu tidak lagi memiliki resonansi yang sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Della Porta dan Diani (2006), aliansi yang bertumpu

pada isu tunggal cenderung tidak stabil dan rentan mengalami perpecahan ketika konteks mobilisasi berubah dan distribusi sumber daya menjadi tidak merata.

Ketiga, sebagai respons terhadap kondisi tersebut, terjadi transformasi strategi gerakan dari mobilisasi jalanan menuju pendekatan yang lebih adaptif, seperti aktivisme digital dan advokasi kebijakan formal. Pergeseran ini dapat dijelaskan melalui *Resource Mobilization Theory* (McCarthy & Zald, 1977), yang menekankan bahwa aktor gerakan akan menyesuaikan penggunaan sumber daya secara rasional sesuai dengan peluang dan keterbatasan struktural. Ketika mobilisasi fisik semakin berisiko dan kurang efektif, arena digital dan institusional menjadi pilihan strategis yang lebih efisien.

Keempat, transformasi strategi tersebut diiringi oleh perubahan dalam framing isu. Narasi yang sebelumnya berfokus pada identitas keagamaan yang eksklusif bergeser menuju isu-isu yang lebih substantif, seperti kesejahteraan, moralitas publik, dan kebijakan sosial. Dalam kerangka *Framing Theory*, perubahan ini mencerminkan upaya gerakan untuk mempertahankan relevansi dan resonansi di tengah perubahan preferensi masyarakat, terutama di kalangan pemilih Muslim muda yang cenderung lebih pragmatis (Snow & Benford, 1988).

Dengan demikian, ini menegaskan bahwa gerakan Islam eks-212 tidak mengalami kemunduran secara linear, melainkan menjalani proses transformasi dan fragmentasi sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap perubahan struktur politik dan sosial di Indonesia. Dinamika ini juga menunjukkan kecenderungan menuju pola *post-Islamism* (Bayat, 2007), di mana gerakan Islam tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mobilisasi identitas yang konfrontatif, tetapi beradaptasi dengan mekanisme demokrasi melalui pendekatan yang lebih pragmatis, plural, dan terinstitusionalisasi.

## **Transformasi Atau Kemunduran**

### **1. Menafsir Ulang Dinamika Pasca 2024**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan gerakan Islam eks-212 setelah Pemilu 2024 tidak dapat direduksi secara sederhana sebagai kemunduran (decline). Secara empiris memang terlihat penurunan aksi massa berskala besar dan

melemahnya koordinasi lintas-ormas. Namun, secara analitis fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk transformasi strategi sekaligus fragmentasi struktural dalam merespons perubahan lingkungan politik.

Dalam kerangka *Political Opportunity Structure* (POS), dinamika gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh konfigurasi elite dan keterbukaan sistem politik (Tarrow, 2011; McAdam, 1996). Pada periode 2014–2019, pembelahan elite yang tajam menciptakan peluang mobilisasi identitas agama secara luas. Gerakan Islam eks-212 memperoleh dukungan simbolik maupun ruang politik dari aktor oposisi yang berkepentingan terhadap polarisasi elektoral (Mietzner & Muhtadi, 2018). Polarisasi tersebut menyediakan struktur peluang yang relatif terbuka bagi mobilisasi jalanan.

Sebaliknya, setelah Pemilu 2024, struktur politik menunjukkan konsolidasi yang lebih stabil dengan berkurangnya antagonisme ideologis. Koalisi besar dan melemahnya oposisi berbasis identitas menghasilkan konfigurasi yang dalam perspektif POS dapat disebut sebagai *closed opportunity structure*. Dalam situasi demikian, mobilisasi konfrontatif menjadi kurang efektif dan kurang memperoleh dukungan elite. Oleh karena itu, berkurangnya aksi massa tidak semata-mata mencerminkan kemunduran ideologis, melainkan respons strategis terhadap penyempitan peluang politik (Tarrow, 2011).

Temuan ini memperluas diskusi mengenai populisme Islam dalam demokrasi Indonesia. Jika pada fase sebelumnya populisme berkembang dalam konteks kompetisi elite yang tajam (Hadiz, 2016; Aspinall & Mietzner, 2019), maka pasca 2024 gerakan Islam menghadapi struktur politik yang lebih terintegrasi dan kurang polaristik, sehingga memerlukan adaptasi strategi.

## 2. Fragmentasi sebagai Konsekuensi Koalisi Berbasis Isu

Fragmentasi organisasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari karakter koalisi yang berbasis pada isu tunggal. *Fragmentation Theory* menjelaskan bahwa aliansi yang terbentuk atas dasar momentum emosional dan isu spesifik cenderung rapuh ketika konteks yang menyatukannya mereda (Della Porta & Diani, 2006). Aksi 212 dibangun atas

framing penistaan agama yang memiliki resonansi moral tinggi. Namun ketika isu tersebut kehilangan daya mobilisasi, fondasi solidaritas kolektif pun melemah. Dalam perspektif *Resource Mobilization Theory* (McCarthy & Zald, 1977), berkurangnya dukungan elite, legitimasi publik, dan akses terhadap ruang mobilisasi mempercepat proses fragmentasi.

Lebih jauh, proses institusionalisasi sebagian elite gerakan turut memicu perbedaan strategi internal. Aktor yang memilih jalur partai politik atau pendekatan birokratis seringkali menghadapi resistensi dari kelompok yang ingin mempertahankan posisi oposisi. Situasi ini memperlihatkan dilema klasik gerakan sosial: integrasi ke dalam sistem formal dapat meningkatkan akses kebijakan, tetapi berisiko melemahkan solidaritas dan identitas kolektif oposisi.

### 3. Pergeseran Framing dan Indikasi Post-Islamisme

Perubahan framing isu dari identitas agama menuju kesejahteraan dan kebijakan publik merupakan salah satu temuan sentral penelitian ini. Dalam kerangka *Framing Theory*, adaptasi narasi merupakan strategi untuk mempertahankan resonansi publik (Snow & Benford, 1988). Framing identitarian yang efektif pada fase polarisasi tinggi 2016–2019 tidak lagi memiliki daya tarik yang sama dalam konteks pasca 2024 yang lebih stabil secara politik.

Kejenuhan publik terhadap politik identitas serta meningkatnya tuntutan terhadap stabilitas ekonomi mendorong gerakan untuk merekonstruksi narasi dan agenda. Fenomena ini sejalan dengan konsep *Post-Islamism* (Bayat, 2007), yang menggambarkan pergeseran dari Islamisme konfrontatif menuju pendekatan yang lebih pragmatis, inklusif, dan kompatibel dengan demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini tampak pada pergeseran fokus dari tuntutan simbolik menuju advokasi kesejahteraan umat dan isu sosial-ekonomi. Dengan demikian, dinamika pasca 2024 dapat dipahami sebagai indikasi adaptasi menuju bentuk gerakan yang lebih pragmatis, tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas religiusnya.

### 4. Digitalisasi dan Restrukturisasi Arena Perjuangan

Peralihan arena perjuangan dari mobilisasi jalanan ke ruang digital dan advokasi kebijakan menunjukkan adanya restrukturisasi strategi. Ketika mobilisasi fisik menjadi kurang efektif atau berisiko tinggi, media sosial menjadi alternatif utama untuk membangun opini dan menjaga jaringan pendukung.

Dalam perspektif *Resource Mobilization Theory*, digitalisasi merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur sumber daya (McCarthy & Zald, 1977). Media sosial menyediakan saluran komunikasi yang lebih murah, fleksibel, dan relatif aman dibanding aksi massa. Namun, mobilisasi digital memiliki karakter yang berbeda: ia lebih terfragmentasi, kurang menghasilkan kohesi kolektif jangka panjang, dan seringkali bersifat episodik.

Di sisi lain, peningkatan advokasi kebijakan dan partisipasi dalam forum formal menunjukkan proses institusionalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Tarrow (2011). Pergeseran ini mengindikasikan perubahan orientasi dari mobilisasi populis menuju pendekatan yang lebih berbasis kebijakan dan negosiasi formal.

## 5. Rekonfigurasi Tipologi Gerakan Islam Pasca 2024

Sintesis antara temuan empiris dan kerangka teoretis dalam penelitian ini menghasilkan suatu tipologi baru mengenai bentuk dan orientasi gerakan Islam pasca Pemilu 2024. Tipologi ini menunjukkan bahwa gerakan Islam tidak lagi beroperasi sebagai blok mobilisasi yang seragam, melainkan mengalami diferensiasi internal yang semakin kompleks sebagai respons terhadap perubahan struktur peluang politik, distribusi sumber daya, dan dinamika sosial. Dalam konteks ini, setidaknya dapat diidentifikasi empat kategori utama, yakni gerakan residual, gerakan adaptif, gerakan terinstitusionalisasi, dan gerakan sosial-keagamaan non-elektoral.

1. Gerakan residual merujuk pada kelompok yang mengalami pelemahan akibat tekanan regulatif, pembatasan organisasi, serta berkurangnya akses terhadap sumber daya strategis. Dalam perspektif *Political Opportunity Structure*, kelompok ini berada dalam kondisi penyempitan ruang politik yang signifikan (Tarrow, 2011; McAdam, 1996). Minimnya dukungan elite serta meningkatnya kontrol negara membatasi kemampuan mereka untuk

melakukan mobilisasi terbuka. Dari sudut pandang *Resource Mobilization Theory* (McCarthy & Zald, 1977), hilangnya sumber daya organisasi dan legitimasi publik turut mempercepat penurunan kapasitas gerakan. Namun demikian, kategori residual tidak selalu berarti kehancuran total, karena dalam banyak kasus kelompok ini bertransformasi menjadi jaringan informal yang lebih fleksibel dan tersembunyi (Della Porta & Diani, 2006).

2. Gerakan adaptif menggambarkan kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konteks sosial-politik melalui pergeseran framing dan strategi mobilisasi. Kelompok ini tidak lagi menekankan narasi identitas agama yang konfrontatif, melainkan mengadopsi isu-isu yang lebih substantif seperti kesejahteraan, moralitas publik, dan keadilan sosial. Pergeseran ini sejalan dengan *Framing Theory*, yang menekankan pentingnya penyesuaian narasi agar tetap relevan dengan audiens (Snow & Benford, 1988). Selain itu, penggunaan media digital sebagai arena baru mobilisasi menunjukkan rasionalitas dalam pengelolaan sumber daya (McCarthy & Zald, 1977). Dalam kerangka yang lebih luas, dinamika ini mencerminkan kecenderungan menuju *post-Islamism*, yaitu pergeseran ke arah pendekatan yang lebih pragmatis dan kompatibel dengan demokrasi (Bayat, 2007).
3. Gerakan terinstitusionalisasi merujuk pada aktor-aktor yang memilih untuk berintegrasi ke dalam sistem politik formal, baik melalui partai politik maupun struktur birokrasi. Proses ini mencerminkan transformasi dari mobilisasi konfrontatif menuju strategi yang lebih berbasis negosiasi dan advokasi kebijakan dalam institusi formal (Tarrow, 2011). Melalui jalur ini, gerakan memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan, namun di sisi lain berpotensi mengalami moderasi tuntutan serta melemahnya identitas kolektif. Selain itu, institusionalisasi sering kali memicu ketegangan internal antara kelompok yang mengadopsi pendekatan pragmatis dan kelompok yang tetap mempertahankan posisi oposisi.
4. Gerakan sosial-keagamaan non-elektoral mencakup kelompok yang mengalihkan fokus pada aktivitas dakwah sosial, pendidikan, dan filantropi.

Pergeseran ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai depolitisasi, melainkan sebagai strategi alternatif untuk membangun pengaruh jangka panjang melalui penguatan basis sosial. Dalam perspektif *post-Islamism* (Bayat, 2007), ekspresi keislaman tidak selalu diwujudkan dalam mobilisasi politik langsung, tetapi juga melalui praktik sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memungkinkan gerakan tetap mempertahankan legitimasi sosial tanpa bergantung pada momentum politik elektoral.

Tipologi ini menegaskan bahwa fragmentasi gerakan Islam pasca Pemilu 2024 tidak mencerminkan kehancuran, melainkan redistribusi energi gerakan ke dalam berbagai kanal baru. Jika pada periode sebelumnya gerakan cenderung terkonsolidasi dalam satu bentuk mobilisasi kolektif, maka pasca 2024 ia berkembang menjadi spektrum yang lebih plural, cair, dan adaptif. Dalam perspektif teoretis, hal ini menguatkan argumen bahwa gerakan sosial bersifat dinamis dan terus mengalami transformasi seiring perubahan struktur peluang politik, distribusi sumber daya, dan preferensi sosial. Oleh karena itu, fase pasca 2024 dapat dipahami sebagai periode rekonfigurasi yang menandai perubahan penting dalam lanskap gerakan Islam di Indonesia kontemporer.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika gerakan Islam Indonesia pasca Pemilu 2024 tidak dapat dipahami sebagai kemunduran menyeluruh, melainkan sebagai proses transformasi dan fragmentasi dalam struktur serta strategi gerakan. Berkurangnya aksi massa besar berbasis identitas agama bukan berarti hilangnya kapasitas kolektif, tetapi mencerminkan perubahan dalam struktur peluang politik yang semakin terkonsolidasi dan tidak lagi menyediakan ruang luas bagi mobilisasi oposisi berbasis antagonisme identitas.

Sejak fase mobilisasi intensif 2016–2019, jaringan eks-212 memasuki tahap rekonfigurasi. Fragmentasi organisasi muncul akibat melemahnya isu pemersatu, menyusutnya dukungan elite politik, serta perbedaan orientasi strategi di antara aktor internal. Koalisi yang sebelumnya terbentuk di atas isu tunggal terbukti rentan

ketika momentum politik yang menopangnya mereda, sebagaimana dijelaskan dalam teori fragmentasi gerakan sosial.

Pada saat yang sama, transformasi strategi terlihat dalam beberapa dimensi utama. Pertama, terjadi pergeseran dari mobilisasi konfrontatif di ruang publik menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan adaptif. Kedua, framing isu mengalami perubahan dari narasi identitas agama menuju isu kesejahteraan, moralitas sosial, serta advokasi kebijakan. Ketiga, arena perjuangan bergeser dari aksi massa fisik ke aktivisme digital dan partisipasi dalam institusi formal. Proses ini menunjukkan adanya kecenderungan institusionalisasi sebagian aktor gerakan dalam sistem politik dan birokrasi.

Dengan demikian, dinamika pasca Pemilu 2024 lebih tepat dipahami sebagai proses rekonfigurasi gerakan Islam. Diferensiasi internal melahirkan beberapa tipologi: kelompok residual yang mengalami pelemahan, kelompok adaptif yang mengubah strategi dan isu, kelompok yang terinstitusionalisasi dalam struktur formal, serta kelompok yang memfokuskan diri pada aktivitas sosial-keagamaan non-elektoral.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan relevansi teori gerakan sosial klasik—terutama *Political Opportunity Structure*, *Resource Mobilization Theory*, dan *Framing Theory*—dalam menjelaskan dinamika Islam politik di Indonesia. Transformasi gerakan terbukti sangat berkaitan dengan perubahan konfigurasi elite, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan meringkai isu yang resonan dengan publik.

Selain itu, temuan penelitian ini menguatkan tesis *Post-Islamism* yang dikemukakan Bayat. Pergeseran dari mobilisasi identitas yang bersifat konfrontatif menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan substantif menunjukkan adanya adaptasi terhadap sistem demokrasi elektoral yang semakin stabil. Islam politik tidak mengalami eliminasi, melainkan mengalami perubahan bentuk yang lebih fleksibel dan kompatibel dengan institusi formal.

Penelitian ini juga menghadirkan kontribusi kebaruan dengan memusatkan perhatian pada fase pasca Pemilu 2024 merupakan periode yang relatif belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, studi ini

memperluas horizon kajian mengenai populisme Islam dan demokrasi di Asia Tenggara.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik Indonesia memasuki fase pasca-polarisasi berbasis agama. Mobilisasi identitas tetap hadir, tetapi tidak lagi menjadi strategi dominan dalam kontestasi politik. Gerakan Islam menunjukkan kecenderungan adaptif, lebih berhati-hati dalam memanfaatkan isu agama, serta lebih terbuka terhadap pendekatan sosial dan kebijakan.

Bagi pembuat kebijakan, situasi ini membuka peluang untuk memperkuat demokrasi substantif melalui pendekatan dialogis dan inklusif terhadap aktor-aktor Islam yang telah bertransformasi. Strategi represif semata tidak cukup efektif; yang diperlukan adalah pendekatan integratif yang mendorong partisipasi politik secara konstruktif dalam kerangka demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS Publishing.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements: An introduction* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2018). Islam and institutional religious freedom in Indonesia. *Studia Islamika*, 25(1), 1–27. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.6755>

- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- McAdam, D. (1996). Conceptual origins, current problems, future directions. In D. McAdam, J. D. McCarthy, & M. N. Zald (Eds.), *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings* (pp. 23–40). Cambridge University Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://doi.org/10.1086/226464>
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Muhtadi, B. (2019). Populisme Islam dan dinamika elektoral Indonesia 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 123–140.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Wiktorowicz, Q. (2004). *Islamic activism: A social movement theory approach*. Indiana University Press.
- Yavuz, M. H. (2003). *Islamic political identity in Turkey*. Oxford University Press.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.